



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/148/Kept/403.013/2023

TENTANG

KRITERIA KONDISI KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN UNTUK SETIAP
UNIT/PERANGKAT DAERAH, JENIS JABATAN DAN KELAS JABATAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Magetan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, diamanatkan bahwa kriteria kondisi kerja pegawai Aparatur Sipil Negara untuk setiap unit / perangkat daerah, jenis jabatan dan kelas jabatan ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kriteria Kondisi Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Untuk Setiap Unit/Perangkat Daerah, Jenis Jabatan Dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6477);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6264);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 28);
23. Peraturan Bupati Magetan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kriteria Kondisi Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Untuk Setiap Unit/Perangkat Daerah, Jenis Jabatan Dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 31 Mei 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Prt. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP: 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/148/Kept/403.013/2023
 TANGGAL : 31 MEI 2023

KRITERIA KONDISI KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN UNTUK SETIAP
 UNIT/PERANGKAT DAERAH, JENIS JABATAN DAN KELAS JABATAN

NO	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA DENGAN RESIKO KERJA TINGGI	KATEGORI KONDISI KERJA UNTUK SETIAP JABATAN PADA Masing-Masing PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN
1	SEKRETARIAT DAERAH	A	JABATAN TINGGI PRATAMA	15
			JABATAN ADMINISTRATOR	14
			JABATAN PELAKSANA	12
		B	JABATAN TINGGI PRATAMA	1
			JABATAN PELAKSANA	13
		C	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	8
			JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	7
			JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	6
			JABATAN PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN	9
			JABATAN PELAKSANA	7
			JABATAN PELAKSANA	6
		D	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	5
			JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	12
			JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	11
		2	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)	A
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	8			
B	JABATAN PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN			9
	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU			10
C	JABATAN PELAKSANA			7
	JABATAN PELAKSANA			6
	JABATAN PELAKSANA			5
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	12			
3	SEKRETARIAT DPRD	B	JABATAN TINGGI PRATAMA	14
		C	JABATAN TINGGI PRATAMA	13
			JABATAN ADMINISTRATOR	12
			JABATAN ADMINISTRATOR	11
			JABATAN PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN	9
			JABATAN PELAKSANA	1
		D	JABATAN PENGAWAS	8
			JABATAN PENGAWAS	12
			JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	11
			JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	10

NO	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA DENGAN RESIKO KERJA TINGGI	KATEGORI KONDISI KERJA UNTUK SETIAP JABATAN PADA MASING-MASING PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN
				9
				8
				7
				6
				5
			JABATAN PELAKSANA	7
				6
				5
				3
4	INSPEKTORAT	A	JABATAN TINGGI PRATAMA	14
			JABATAN ADMINISTRATOR	11
		B	JABATAN ADMINISTRATOR	12
			JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU INSPEKTORAT	11
				10
				9
			8	
		JABATAN PELAKSANA	3	
		C	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	12
			JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU INSPEKTORAT	12
			JABATAN PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN	9
			JABATAN PELAKSANA	7
6				
5				
5	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	B	JABATAN TINGGI PRATAMA	14
			JABATAN PELAKSANA	1
		C	JABATAN ADMINISTRATOR	11
			JABATAN PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN	9
			JABATAN PELAKSANA	3
		D	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	12
				11
				10
				9
				8
			7	
			6	
JABATAN PELAKSANA	7			
6				
5				
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	B	JABATAN TINGGI PRATAMA	14
			JABATAN PELAKSANA	1
		C	JABATAN ADMINISTRATOR	11

NO	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA DENGAN RESIKO KERJA TINGGI	KATEGORI KONDISI KERJA UNTUK SETIAP JABATAN PADA MASING-MASING PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	
	DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		JABATAN PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN	9	
			JABATAN PELAKSANA	3	
		D	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	12	
				11	
				10	
				9	
				8	
				7	
				6	
				JABATAN PELAKSANA	7
					6
				5	
		7	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	B	JABATAN TINGGI PRATAMA
C	JABATAN ADMINISTRATOR			13	
				12	
				11	
	JABATAN PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN			9	
JABATAN PELAKSANA	1				
D	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU			JABATAN PENGAWAS	8
				12	
				11	
				10	
				9	
				8	
				7	
		6			
		5			
		JABATAN PELAKSANA	7		
6					
5					
3					
7	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	B	JABATAN TINGGI PRATAMA	14	
		C	JABATAN ADMINISTRATOR	13	
				12	
				11	
			JABATAN PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN	9	
		JABATAN PELAKSANA	1		
		D	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	JABATAN PENGAWAS	8
				12	
				11	
				10	
				10	

NO	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA DENGAN RESIKO KERJA TINGGI	KATEGORI KONDISI KERJA UNTUK SETIAP JABATAN PADA MASING-MASING PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN
				9
				8
				7
				6
				5
			JABATAN PELAKSANA	7
			JABATAN PELAKSANA	6
			JABATAN PELAKSANA	5
			JABATAN PELAKSANA	3
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	B	JABATAN TINGGI PRATAMA	14
		C	JABATAN ADMINISTRATOR	13
			JABATAN ADMINISTRATOR	12
			JABATAN ADMINISTRATOR	11
			JABATAN PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN	9
			JABATAN PELAKSANA	1
		D	JABATAN PENGAWAS	8
			JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	12
			JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	11
			JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	10
			JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	9
			JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	8
			JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	7
			JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	6
			JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	5
			JABATAN PELAKSANA	7
			JABATAN PELAKSANA	6
			JABATAN PELAKSANA	5
			JABATAN PELAKSANA	3
9	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	B	JABATAN TINGGI PRATAMA	14
		C	JABATAN ADMINISTRATOR	13
			JABATAN ADMINISTRATOR	12
			JABATAN ADMINISTRATOR	11
			JABATAN PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN	9
			JABATAN PELAKSANA	1
		D	JABATAN PENGAWAS	8
			JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	12
			JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	11
			JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	10
			JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	9
			JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	8
			JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	7
		JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	6	

NO	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA DENGAN RESIKO KERJA TINGGI	KATEGORI KONDISI KERJA UNTUK SETIAP JABATAN PADA MASING-MASING PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	
				5	
			JABATAN PELAKSANA	7	
				6	
				5	
				3	
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	B	JABATAN TINGGI PRATAMA	14	
		C	JABATAN ADMINISTRATOR	13	
				12	
				11	
			JABATAN PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN	9	
		D	JABATAN PELAKSANA	1	
			JABATAN PENGAWAS	8	
			JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU		12
					11
					10
					9
					8
					7
					6
				5	
			JABATAN PELAKSANA		7
					6
					5
				3	
11	DINAS KESEHATAN	B	JABATAN TINGGI PRATAMA	14	
		C	JABATAN ADMINISTRATOR	13	
				12	
				11	
			JABATAN PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN	9	
		D	JABATAN PELAKSANA	1	
			JABATAN PENGAWAS	8	
			JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU		12
					11
					10
					9
					8
					7
					6
				5	
			JABATAN PELAKSANA		7
					6
					6
				5	

NO	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA DENGAN RESIKO KERJA TINGGI	KATEGORI KONDISI KERJA UNTUK SETIAP JABATAN PADA MASING-MASING PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN
				3
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	B	JABATAN TINGGI PRATAMA	14
			C	JABATAN ADMINISTRATOR
		12		
		11		
		9		
		JABATAN PELAKSANA		1
		D	JABATAN PENGAWAS	8
			JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	12
				11
				10
				9
				8
				7
				6
				5
			JABATAN PELAKSANA	7
				6
5				
3				
13	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	B	JABATAN TINGGI PRATAMA	14
			C	JABATAN ADMINISTRATOR
		12		
		11		
		9		
		JABATAN PELAKSANA		1
		D	JABATAN PENGAWAS	8
			JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	12
				11
				10
				9
				8
				7
				6
				5
			JABATAN PELAKSANA	7
				6
5				
3				
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	B	JABATAN TINGGI PRATAMA	14
		C	JABATAN ADMINISTRATOR	13
				12

NO	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA DENGAN RESIKO KERJA TINGGI	KATEGORI KONDISI KERJA UNTUK SETIAP JABATAN PADA MASING-MASING PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN
				11
			JABATAN PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN	9
			JABATAN PELAKSANA	1
		D	JABATAN PENGAWAS	8
			JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	12
				11
				10
				9
				8
				7
				6
				5
			JABATAN PELAKSANA	7
				6
				5
3				
15	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	B	JABATAN TINGGI PRATAMA	14
			C	JABATAN ADMINISTRATOR
		12		
		11		
		JABATAN PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN		9
		D	JABATAN PELAKSANA	1
			JABATAN PENGAWAS	8
			JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	12
				11
				10
				9
				8
				7
				6
			5	
JABATAN PELAKSANA	7			
	6			
	5			
	3			
16	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	B	JABATAN TINGGI PRATAMA	14
			C	JABATAN ADMINISTRATOR
		12		
		11		
		JABATAN PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN		9
		JABATAN PELAKSANA	1	

NO	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA DENGAN RESIKO KERJA TINGGI	KATEGORI KONDISI KERJA UNTUK SETIAP JABATAN PADA MASING-MASING PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	
		D	JABATAN PENGAWAS	8	
			JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	12	
				11	
				10	
				9	
				8	
				7	
				6	
				5	
			JABATAN PELAKSANA	7	
				6	
				5	
				3	
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			B	JABATAN TINGGI PRATAMA
		C		JABATAN ADMINISTRATOR	13
			12		
			JABATAN PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN	11	
				9	
		JABATAN PELAKSANA	1		
		D	JABATAN PENGAWAS	8	
				12	
			JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	11	
				10	
				9	
				8	
				7	
				6	
5					
JABATAN PELAKSANA	7				
	6				
	5				
	3				
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	B	JABATAN TINGGI PRATAMA	14	
		C	JABATAN ADMINISTRATOR	13	
				12	
			JABATAN PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN	11	
				9	
		JABATAN PELAKSANA	1		
		D	JABATAN PENGAWAS	8	
				12	
			JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	11	
				10	

NO	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA DENGAN RESIKO KERJA TINGGI	KATEGORI KONDISI KERJAUNTUK SETIAP JABATAN PADA MASING-MASING PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN
				9 8 7 6 5
19	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	B	JABATAN TINGGI PRATAMA	14
		C	JA	13 12 11
			JABATAN PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN	9
			JABATAN PELAKSANA	1
			JABATAN PENGAWAS	8
		D	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	12 11 10 9 8 7 6 5
			JABATAN PELAKSANA	7 6 5 3
20	DINAS PERHUBUNGAN	B	JABATAN TINGGI PRATAMA	14
		C	JABATAN ADMINISTRATOR	13 12 11
			JABATAN PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN	9
			JABATAN PELAKSANA	1
			JABATAN PENGAWAS	8
		D	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	12 11 10 9 8 7 6

NO	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA DENGAN RESIKO KERJA TINGGI	KATEGORI KONDISI KERJA UNTUK SETIAP JABATAN PADA MASING-MASING PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN
				5
			JABATAN PELAKSANA	7
				6
				5
				3
21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	B		JABATAN TINGGI PRATAMA
		C	JABATAN ADMINISTRATOR	13
				12
				11
			JABATAN PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN	9
				1
		D	JABATAN PELAKSANA	1
			JABATAN PENGAWAS	8
			JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	12
				11
				10
				9
				8
				7
				6
			5	
			JABATAN PELAKSANA	7
				6
				5
		3		
22	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	B	JABATAN TINGGI PRATAMA	14
		C	JABATAN ADMINISTRATOR	13
				12
				11
			JABATAN PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN	9
				1
		D	JABATAN PENGAWAS	8
			JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	12
				11
				10
				9
				8
				7
				6
			5	
			JABATAN PELAKSANA	7
				6
		5		

NO	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA DENGAN RESIKO KERJA TINGGI	KATEGORI KONDISI KERJA UNTUK SETIAP JABATAN PADA MASING-MASING PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN
				3
23	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	B	JABATAN TINGGI PRATAMA	14
			C	JABATAN ADMINISTRATOR
		12		
		11		
		9		
		JABATAN PELAKSANA		1
		D	JABATAN PENGAWAS	8
			JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	12
				11
				10
				9
				8
				7
				6
				5
			JABATAN PELAKSANA	7
				6
5				
3				
24	DINAS PPKB DAN PPPA	B	JABATAN TINGGI PRATAMA	14
			C	JABATAN ADMINISTRATOR
		12		
		11		
		9		
		JABATAN PELAKSANA		1
		D	JABATAN PENGAWAS	8
			JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	12
				11
				10
				9
				8
				7
				6
				5
			JABATAN PELAKSANA	7
				6
5				
3				
25	DINAS SOSIAL	B	JABATAN TINGGI PRATAMA	14
		C	JABATAN ADMINISTRATOR	13
				12

NO	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA DENGAN RESIKO KERJA TINGGI	KATEGORI KONDISI KERJA UNTUK SETIAP JABATAN PADA MASING-MASING PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN
				11
			JABATAN PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN	9
			JABATAN PELAKSANA	1
		D	JABATAN PENGAWAS	8
			JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	12
				11
				10
				9
				8
				7
				6
				5
			JABATAN PELAKSANA	7
				6
				5
3				
26	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN	B	JABATAN TINGGI PRATAMA	14
		C		13
			JABATAN ADMINISTRATOR	12
				11
			JABATAN PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN	9
		D	JABATAN PELAKSANA	1
			JABATAN PENGAWAS	8
			JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	12
				11
				10
				9
				8
				7
				6
			JABATAN PELAKSANA	5
7				
6				
5				
3				
27	DINAS TENAGA KERJA	B	JABATAN TINGGI PRATAMA	14
		C		13
			JABATAN ADMINISTRATOR	12
				11
			JABATAN PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN	9
	1			

NO	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA DENGAN RESIKO KERJA TINGGI	KATEGORI KONDISI KERJA UNTUK SETIAP JABATAN PADA MASING-MASING PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN
		D	JABATAN PENGAWAS	8
			JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	12
				11
				10
				9
				8
				7
				6
				5
			JABATAN PELAKSANA	7
				6
				5
				3
				3
28	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	B	JABATAN TINGGI PRATAMA	14
		C	JABATAN ADMINISTRATOR	13
				12
			11	
			JABATAN PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN	9
		JABATAN PELAKSANA	1	
		D	JABATAN PENGAWAS	8
			JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	12
				11
				10
				9
				8
				7
			6	
5				
JABATAN PELAKSANA	7			
	6			
	5			
	3			
30	KECAMATAN	B	JABATAN ADMINISTRATOR	12
		C	JABATAN ADMINISTRATOR	11
			JABATAN PENGAWAS	9
			JABATAN PENGAWAS	8
			JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	6
		D	JABATAN PELAKSANA	6
5				
3				
31	PUSKESMAS	A	JABATAN PELAKSANA	3
			1	
		B	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	6

NO	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA DENGAN RESIKO KERJA TINGGI	KATEGORI KONDISI KERJA UNTUK SETIAP JABATAN PADA MASING-MASING PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN
				5
			PELAKSANA	6
				5
			JABATAN PENGAWAS	8
		C	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	14
				12
				11
				10
				9
				8
				7

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
 Pemula Tingkat I
 NIP: 19740206 200003 1 004

